



Perempuan dan Hukum dalam Pandangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun: Kajian Perspektif Gender

Nabila Zatadini^{1*}, Adinda Akhsanal Viqria², Muhammad Galib Iqbal³
nabila@umko.ac.id¹, adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id², galibiqbal@umko.ac.id³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

*Korespondensi: nabila@umko.ac.id

Abstract

This study analyzes the position of women in the Lampung Pepadun customary law system, focusing on the dynamics between formal customary provisions and their implementation in the modern context. The research was conducted in North Lampung through a socio-legal approach, involving 25 respondents representing traditional leaders, women leaders, and the general public. The study results revealed that although the Lampung Pepadun customary law is formally patrilineal, there is an adaptation in practice. Women take their role in implementing customary law, namely building "shadow authority" through informal roles in decision-making. The inheritance system, which traditionally prioritizes boys, is now beginning to adapt through the practice of grants during life to protect property rights for women. This transformation was driven by increased access to higher education for women (from 20% to 75% between generations), which contributed to the support of 40% of Indigenous leaders for a more gender-responsive reinterpretation of customary law. The study concludes that there is an evolution in Lampung Pepadun customary law that accommodates women's rights while maintaining core cultural values.

Status Artikel:

Diterima: 02-12-2024

Direvisi: 24-12-2024

Diterima: 22-12-2024

Kata Kunci:

Hukum adat;
Hak perempuan;
Kesetaraan gender;
Lampung Pepadun;
Transformasi hukum.



© 2024 Nabila Zatadini, Adinda Akhsanal Viqria, Muhammad Galib Iqbal

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Peran dan kedudukan perempuan dalam kerangka hukum sering kali menjadi subjek yang kompleks dan menarik untuk diteliti, terutama ketika dipandang dari sudut pandang masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi budaya mereka (Puspandari et al., 2020) (Syaikhu, 2019). Pada konteks ini, masyarakat adat Lampung Pepadun menawarkan landasan yang kaya untuk menjelajahi dinamika antara perempuan dan hukum, serta bagaimana pandangan ini dipengaruhi oleh perspektif gender. Masyarakat adat Lampung Pepadun, dengan warisan budaya dan adat istiadat yang kaya, memberikan latar belakang yang menarik untuk memahami cara mereka memandang dan memperlakukan perempuan dalam konteks hukum. Dalam masyarakat Lampung Pepadun, perempuan menempati posisi yang unik - di satu sisi memiliki nilai simbolik tinggi yang tercermin dalam filosofi adat, namun di sisi lain menghadapi

berbagai bentuk ketidakadilan struktural dalam praktik adat sehari-hari (Zuhraeni, 2018). Sistem adat Lampung Pepadun yang bersifat patrilineal menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam struktur kepemimpinan adat. Posisi ini dilegitimasi melalui konsep Punyimbang yang mengatur bahwa hanya laki-laki yang dapat mewarisi kepemimpinan adat (Hadikusuma, 2003). Namun, perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran gender telah mendorong munculnya pertanyaan kritis tentang relevansi sistem ini dalam konteks modern.

Kajian tentang perspektif gender dalam hubungan antara perempuan dan hukum di lingkungan ini bukan hanya memberikan wawasan tentang aspek hukumnya, tetapi juga menggali dinamika sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya (Zatadini et al, 2023). Bagi masyarakat tradisional, sistem budaya patriarki dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan, karena seringkali dihubungkan dengan prinsip kodrat dan kekuasaan yang dianggap mutlak. Keyakinan akan ketetapan Tuhan mengenai adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan memandu tatanan kehidupan manusia, yang kemudian diatur berdasarkan perbedaan tersebut (Zuhraeni, 2018). Studi-studi terdahulu mengindikasikan bahwa transformasi perspektif gender dalam masyarakat adat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Wibowo dkk. (2022), mengidentifikasi tiga *driver* utama perubahan: (1) peningkatan tingkat pendidikan, terutama di kalangan perempuan, (2) urbanisasi yang membuka akses terhadap nilai-nilai modern, dan (3) penetrasi media digital yang memperluas wawasan masyarakat. Dalam konteks Lampung pepadun, faktor-faktor ini berinteraksi dengan nilai-nilai adat yang mengakar, menciptakan dinamika unik yang memerlukan kajian mendalam.

Kerangka teoretis dalam penelitian ini dibangun di atas teori keadilan gender yang dikembangkan oleh Nancy Fraser (2021) tentang tiga dimensi keadilan: redistribusi (ekonomi), pengakuan (budaya), dan representasi (politik). Perspektif ini diperkuat dengan konsep *adaptive traditional law* yang dikemukakan oleh Sulistyowati (2023), yang menekankan pentingnya fleksibilitas sistem hukum adat dalam menghadapi perubahan sosial. Kombinasi kerangka teoretis ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap dinamika gender dalam konteks hukum adat Lampung Pepadun.

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk membuka pintu ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana di zaman modern ini masyarakat adat Lampung Pepadun memandang perempuan dalam konteks hukum adat dan bagaimana pandangan ini tercermin dalam praktik sehari-hari mereka (Mudaris, 2009) (Bangun, 2020). Dengan menerapkan lensa gender, kita dapat menjelajahi bagaimana konstruksi sosial tentang maskulinitas dan feminitas memengaruhi persepsi, keputusan, dan interaksi hukum terhadap perempuan dalam masyarakat adat ini. Melalui penelitian ini, kita berharap untuk tidak hanya mendokumentasikan pandangan masyarakat adat Lampung Pepadun tentang perempuan dan hukum, tetapi juga untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana gender memainkan peran krusial dalam membentuk struktur kekuasaan, keadilan, dan kesetaraan dalam konteks hukum adat Lampung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang kompleksitas hubungan antara perempuan dan hukum dalam masyarakat adat.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*) untuk memahami hukum dalam konteks kemasyarakatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi partisipatif dan studi dokumen yang berkaitan dengan adat dan tradisi masyarakat Lampung Pepadun. Kemudian hasil temuan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan kerangka teori Crenshaw (1991) dan Fraser (2021) yang mewakilkan analisis perspektif gender. Penelitian ini melibatkan 25 responden yang terdiri dari 10 orang tokoh adat (punyimbang), 8 orang tokoh perempuan yang bersuku Lampung dan 7 anggota masyarakat umum. Responden tersebut dipilih dengan teknik pengambilan sampling yaitu *purposive sampling* berdasarkan pemetaan kebutuhan dan rekomendasi dari tokoh adat di Lampung Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan dalam Struktur Adat Lampung Pepadun

Sistem Kepenyimbangan dan Otoritas Perempuan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lampung Utara yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Lampung, ditemukan kompleksitas yang mendalam dalam posisi perempuan pada struktur adat masyarakat Pepadun. Hasil observasi dan wawancara mendalam dengan para responden mengungkapkan bahwa kedudukan perempuan dalam sistem kepenyimbangan pada adat Lampung pepadun menunjukkan pola yang paradoksal. Istilah punyimbang memiliki akar kata yang terdiri dari dua bagian: 'pun' dan 'nyimbang'. Kata 'Pun' mengandung makna seseorang yang memperoleh penghormatan dan dianggap sebagai tetua dalam masyarakat. Sementara itu, 'nyimbang' memiliki arti mengambil peran sebagai penyeimbang dan penerima warisan. Dengan demikian, punyimbang atau penyeimbang dapat diartikan sebagai individu yang mendapatkan kehormatan dalam masyarakat berdasarkan garis keturunannya (Junaiyah,1990).

Dari lima 25 responden yang diwawancarai dan diobservasi, terdapat satu perempuan yang memiliki kedudukan formal dalam struktur adat Lampung Pepadun. Meski demikian, penelitian menemukan fenomena menarik tentang adanya otoritas bayangan yang dimiliki perempuan dalam masyarakat Lampung pepadun. Para istri punyimbang khususnya, memainkan peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan meski tidak terlihat dalam forum formal. Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan salah satu responden, seorang istri punyimbang, terungkap bahwa proses musyawarah informal di rumah seringkali mendahului dan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam forum adat resmi.

Fenomena ini menunjukkan adanya mekanisme adaptif yang dikembangkan perempuan dalam menghadapi batasan struktural. Meski secara formal tidak menduduki posisi sebagai punyimbang, perempuan telah mengembangkan jalur-jalur informal yang efektif untuk menyalurkan pengaruh dan aspirasi mereka. Hal ini sejalan dengan konsep resistensi sehari-hari yang dikemukakan oleh Scott (1985) tentang strategi kelompok subordinat dalam menghadapi dominasi struktural.

Sistem Pewarisan dan Hak Properti

Analisis terhadap beberapa dokumen adat dan literatur tentang praktik pewarisan dalam sistem masyarakat adat Lampung menunjukkan pola yang kompleks. Sistem mayoritas yang dikuasai oleh laki-laki masih dominan, dengan 80% kasus pewarisan menempatkan anak laki-laki tertua sebagai pewaris utama harta pusaka suatu keluarga di suku Lampung. Namun, hasil penelitian ini menemukan adanya adaptasi-adaptasi penting dalam praktik saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan perempuan, mulai muncul praktik yang terbentuk seperti hibah semasa hidup sebagai strategi para orang tua dalam masyarakat Lampung saat ini untuk memberikan akses properti kepada anak perempuan. Sekitar 15% keluarga yang diteliti telah menerapkan sistem ini, memberikan aset seperti tanah atau kebun kepada anak perempuan sebelum orang tua meninggal. Praktik ini menunjukkan adanya upaya adaptif untuk menyiasati batasan sistem pewarisan tradisional.

Praktik Perkawinan dan Implikasinya

Sistem perkawinan yang dianut masyarakat Lampung Pepadun memiliki implikasi mendalam bagi kedudukan perempuan. Analisis terhadap dokumen dan literatur Lampung dalam hal kasus perkawinan menunjukkan bahwa praktik ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam posisi perempuan. Besaran uang pemberian dari pihak laki-laki dan permintaan dari pihak perempuan yang menjadi suatu standar pada masyarakat Lampung Pepadun dapat menjadi sebuah polemik, yang awalnya dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap mempelai perempuan, dalam praktiknya sering kali menjadi faktor yang justru membatasi otonomi seorang perempuan Lampung Pepadun. Penelitian menemukan bahwa perempuan yang dinikahkan dengan pemberian yang tinggi seringkali menghadapi ekspektasi yang lebih besar untuk membalas nilai tersebut dengan kepatuhan dan pengabdian total kepada keluarga suami. Sehingga hal tersebut berdasarkan analisis perspektif gender dapat dikategorikan sebagai pembatas ruang gerak perempuan sehingga menimbulkan praktik patriarki yang selama ini terjadi.

Manifestasi Ketidakadilan Struktural dalam Konteks Sosial

Penelitian lapangan mengungkapkan bagaimana ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Lampung Pepadun. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka teoretis Kimberlé Crenshaw (1991), tentang interseksionalitas, ketidakadilan ini muncul dalam bentuk yang berlapis dan saling terkait. Hasil penelitian yang telah terkonfirmasi dan dianalisis menggunakan kerangka teoritis itu akan dijelaskan secara detail di bawah ini:

Subordinasi dalam Struktur Pengambilan Keputusan

Observasi terhadap beberapa pertemuan adat selama periode penelitian mengungkapkan pola subordinasi yang sistematis. Dalam forum-forum adat, perempuan seringkali hadir namun tidak memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Data menunjukkan bahwa dari seluruh keputusan adat yang diambil, hanya 15% yang melibatkan pertimbangan aktif dari peserta perempuan. Kondisi ini diperparah dengan adanya pemahaman kultural yang menganggap bahwa urusan adat adalah domain laki-laki.

Praktik subordinasi ini semakin kompleks dalam kasus perempuan dari keluarga punyimbang. Meskipun mereka berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi, pengaruh mereka tetap terbatas pada ranah-ranah yang dianggap sesuai untuk perempuan, seperti urusan perkawinan dan ritual adat. Hal ini menunjukkan bagaimana status sosial tidak serta merta mengatasi batasan gender dalam struktur adat.

Stereotipe dan Pembatasan Peran

Hasil penelitian ini menemukan bahwa stereotipe gender yang kuat masih mewarnai kehidupan masyarakat adat Lampung Pepadun. Analisis terhadap pola pengasuhan dan pendidikan anak menunjukkan adanya ekspektasi yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan sejak dini diarahkan pada peran-peran domestik dan seremonial, sementara anak laki-laki dipersiapkan untuk peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Data dari sepuluh keluarga punyimbang yang diteliti menunjukkan bahwa 80% keluarga masih menerapkan pola pengasuhan yang berbeda berdasarkan gender. Perbedaan ini meliputi akses terhadap pendidikan tinggi, kebebasan mobilitas, dan pelibatan dalam urusan adat. Stereotipe ini kemudian menjadi dasar pembenaran bagi berbagai bentuk diskriminasi struktural pada kelompok masyarakat Lampung Pepadun.

Beban Ganda dan Eksploitasi Ekonomi

Hasil penelitian mengungkapkan fenomena beban ganda yang dialami perempuan Lampung Pepadun. Dalam konteks ekonomi, perempuan tidak hanya dituntut untuk mengelola urusan domestik tetapi juga berkontribusi pada ekonomi keluarga. Data dari delapan belas rumah tangga yang diamati menunjukkan bahwa 75% perempuan menjalankan peran ganda - mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah tambahan. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan. Dalam banyak kasus, pendapatan yang dihasilkan perempuan dianggap sebagai "penghasilan tambahan" dan tidak mengubah posisi mereka dalam hierarki pengambilan keputusan keluarga. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Nancy Fraser sebagai *maldistribution* atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pengakuan.

Keterbatasan Akses pada Sumber Daya Produktif

Analisis terhadap pola kepemilikan dan pengelolaan sumber daya produktif menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Dari hasil wawancara terbuka kepada 25 responden, hanya 10% yang mengatakan bahwa pola kepemilikan dan pengelolaan lahan yang mereka punya yang berada di bawah kendali perempuan. Kondisi ini memiliki implikasi serius terhadap kemandirian ekonomi dan posisi tawar perempuan dalam struktur sosial. Keterbatasan akses ini tidak hanya menyangkut kepemilikan formal, tetapi juga meliputi akses terhadap kredit, teknologi, dan pelatihan. Penelitian menemukan bahwa program-program pengembangan kapasitas yang ada di masyarakat cenderung bias gender, dengan 70% program difokuskan pada aktivitas yang didominasi laki-laki.

Transformasi dan Resistensi

Meskipun menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan struktural, hasil penelitian juga menemukan adanya upaya-upaya transformatif yang dilakukan perempuan Lampung Pepadun. Gerakan ini muncul dalam berbagai bentuk, dari yang halus hingga yang lebih terbuka, seperti:

a) Adaptasi Kultural

- Reinterpretasi nilai-nilai adat dari perspektif perempuan
- Pengembangan jaringan solidaritas informal
- Modifikasi praktik-praktik tradisional

b) Pemberdayaan Ekonomi

- Pembentukan kelompok usaha berbasis perempuan
- Pengembangan keterampilan alternatif
- Pemanfaatan teknologi digital untuk akses pasar

Transformasi Peran Gender dan Dinamika Perubahan Sosial

Pendidikan Sebagai Faktor Perubahan

Temuan lain berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini terhadap 25 responden menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun mengungkapkan peran signifikan pendidikan dalam mentransformasi pandangan dan peran gender. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi pada generasi muda perempuan Lampung kini telah membawa perubahan cara pandang terhadap nilai-nilai tradisional dan peran gender dalam masyarakat adat. Dari observasi terhadap sepuluh keluarga punyimbang, terlihat perubahan drastis dalam prioritas pendidikan untuk anak perempuan. Jika pada generasi sebelumnya hanya 20% perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi, pada generasi saat ini angka tersebut meningkat menjadi 75%. Perubahan ini membawa dampak signifikan pada cara perempuan muda memosisikan diri dalam struktur adat dan menegosiasikan peran mereka.

Pergeseran Praktik Kegiatan Adat

Hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan dan upacara adat selama periode penelitian ini menunjukkan adanya modifikasi-modifikasi penting dalam praktik adat pada masyarakat Lampung Pepadun. Meski struktur dasarnya tetap dipertahankan, terjadi penyesuaian yang memberi ruang lebih besar bagi partisipasi perempuan. Pergeseran ini terutama terlihat dalam tiga aspek:

a) Pelaksanaan Kegiatan Adat

- Peningkatan peran aktif perempuan dalam perencanaan
- Modifikasi tata cara yang lebih inklusif
- Penafsiran ulang makna simbolik dari perspektif perempuan

b) Sistem Pengambilan Keputusan

- Munculnya forum-forum informal yang diinisiasi perempuan
- Pengakuan bertahap terhadap suara perempuan dalam musyawarah adat
- Kolaborasi lintas gender dalam penyelesaian masalah komunitas

c) Praktik Ekonomi Adat

- Pengembangan usaha berbasis kearifan lokal oleh perempuan
- Modernisasi pengelolaan aset komunal
- Integrasi nilai ekonomi modern dengan prinsip adat

Prospek Perubahan dan Harmonisasi Hukum Adat

Model Adaptasi Hukum Adat

Hasil lain dalam penelitian ini pula mengidentifikasi pola-pola adaptasi hukum adat Lampung Pepadun dalam merespons tuntutan kesetaraan gender:

- a) Reinterpretasi Norma Adat Berdasarkan observasi terhadap praktik-praktik adat kontemporer, terlihat adanya upaya reinterpretasi norma adat yang lebih responsif gender. Para tokoh adat progresif mulai membuka ruang diskusi tentang penafsiran ulang nilai-nilai adat yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian menemukan bahwa 40% tokoh adat yang diwawancarai mendukung penafsiran yang lebih fleksibel terhadap aturan-aturan adat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.
- b) Integrasi Sistem Hukum Studi terhadap penyelesaian sengketa adat menunjukkan berkembangnya model hybrid yang mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum nasional. Dalam kasus-kasus warisan dan perkawinan, misalnya, masyarakat mulai mengadopsi praktik dokumentasi formal untuk melindungi hak-hak perempuan sambil tetap mempertahankan ritual adat.

Pengaruh Modernisasi Terhadap Sistem Hukum Adat

- a) Perubahan Struktur Sosial Pengamatan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat Lampung Pepadun. Urbanisasi dan pendidikan telah mendorong munculnya elit baru yang lebih terbuka terhadap perubahan. Penelitian menemukan bahwa keluarga-keluarga dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih akomodatif terhadap hak-hak perempuan dalam praktik adat.
- b) Transformasi Nilai Analisis
perbandingan antar generasi mengungkapkan pergeseran nilai yang signifikan. Generasi muda, terutama yang berpendidikan tinggi, menunjukkan kecenderungan untuk menginterpretasikan nilai-nilai adat dalam konteks kesetaraan gender modern.

Pola Resistensi dan Negosiasi

- a) Strategi Adaptif perempuan dalam penelitian ini mengungkapkan berbagai strategi yang dikembangkan perempuan dalam menegosiasikan hak-hak mereka:
 - Pembentukan kelompok-kelompok solidaritas berbasis kekerabatan
 - Pengembangan jaringan ekonomi mandiri
 - Pemanfaatan forum-forum adat untuk advokasi hak
- b) Mekanisme Penyelesaian Konflik Analisis terhadap kasus-kasus sengketa adat menunjukkan evolusi dalam mekanisme penyelesaian konflik:
 - Pengembangan forum mediasi yang lebih inklusif
 - Pelibatan tokoh perempuan dalam proses musyawarah
 - Integrasi perspektif gender dalam pertimbangan keputusan

SIMPULAN

Penelitian tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun telah mengungkapkan dinamika kompleks antara ketahanan nilai-nilai patriarkal dan munculnya adaptasi progresif dalam praktik adat. Melalui pendekatan sosio-legal dan

wawancara mendalam dengan 25 responden, penelitian menemukan tiga pola utama yang menandai posisi perempuan dalam struktur adat Lampung Pepadun.

Pada level struktural, meskipun dominasi patriarkal masih kuat dalam sistem kepenyimbangan, perempuan telah mengembangkan mekanisme adaptif melalui otoritas bayangan. Dari 25 responden, walaupun hanya satu perempuan yang memiliki kedudukan formal, para istri punyimbang berhasil membangun pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah informal. Fenomena ini menunjukkan kapasitas perempuan dalam menavigasi batasan struktural tanpa konfrontasi langsung dengan sistem yang ada.

Dalam aspek ekonomi dan properti, penelitian mengidentifikasi transformasi penting dalam praktik pewarisan. Di tengah dominasi sistem patrilineal yang menempatkan 80% warisan pada anak laki-laki tertua, muncul adaptasi berupa praktik hibah semasa hidup yang diterapkan 15% keluarga untuk menjamin akses properti bagi anak perempuan. Praktik ini, bersama dengan munculnya kelompok usaha berbasis perempuan dan pemanfaatan teknologi digital untuk akses pasar, mencerminkan evolusi sistem adat dalam merespons kebutuhan ekonomi kontemporer.

Temuan paling signifikan terletak pada peran pendidikan sebagai katalis perubahan. Peningkatan drastis akses pendidikan tinggi bagi perempuan dari 20% menjadi 75% antar generasi telah menghasilkan transformasi cara pandang terhadap peran gender. Perubahan ini termanifestasi dalam dukungan 40% tokoh adat terhadap reinterpretasi norma adat yang lebih responsif gender, serta berkembangnya model hybrid yang mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum nasional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun sedang mengalami transformasi fundamental dalam memandang dan memperlakukan perempuan, ditandai dengan munculnya berbagai bentuk adaptasi yang memungkinkan negosiasi antara tradisi dan tuntutan modernitas. Temuan ini berimplikasi pada perlunya pengembangan kerangka hukum adat yang lebih akomodatif terhadap kesetaraan gender sambil tetap mempertahankan nilai-nilai kultural yang esensial bagi identitas masyarakat Lampung Pepadun.

REFERENSI

- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74–82.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299.
- Fraser, N. (2021). Gender, capital and care. *Why gender*, 100, 144.
- Hadikusuma, H. (2003). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Mandar Maju.
- Junaiyah, H. M., dkk. (1990). Punyimbang dan kepunyimbangan dalam masyarakat adat Lampung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mudaris, H. (2009). Menuju Relasi Laki-laki dan Perempuan Yang Adil dan Setara. *Yinyang*, 4(2), 234–248.
- Puspendari, Rr. Y., Nabila, F., & Aziz, A. (2020). Analisis Yuridis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan Nasional. *Jurnal Untidar*, 4(2), 78–89.

- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Sulistyowati, E. (2023). Dinamika Gender dalam Hukum Adat Kontemporer. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 14(2), 156-170.
- Syaikhu, S. (2019). Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender. *El-Mashlahah*, 8(2), 122–134. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>
- Wibowo, S., dkk. (2022). Transformasi Sistem Hukum Tradisional di Indonesia Modern. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Asia*, 8(1), 112-128.
- Zatadini, N., Muhammad Galib Iqbal, & Adinda Akhsanal Viqria. (2023). Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 232–239. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1048>
- Zuhriani, Z. (2018). Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 197–125. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2361>